

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu terkait keberdayaan KPM Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo oleh Poltekesos Bandung. Meskipun demikian, peneliti meninjau dan memahami berbagai penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan penelitian ini. Peninjauan dan pemahaman terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan pertimbangan yang dapat dijadikan acuan dasar dan perbandingan selama proses penelitian, sehingga memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam kajian konseptual ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

2.1.1 Tingkat Keberdayaan Peserta Program P2L di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pratiwi, Nurmayasari, Siliviyanti, & Nikmatullah. 2023. Universitas Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat keberdayaan peserta Program P2L di Kecamatan Jati Agung. Aspek-aspek yang diteliti adalah tingkat keberdayaan menurut Suharto (2008) meliputi: kekuasaan di dalam (*power to*) atau kesadaran dan keinginan untuk berubah, kekuasaan untuk (*power within*) atau kapasitas untuk memperoleh akses, kekuasaan atas (*power over*) atau kemampuan mengatasi hambatan, serta kekuasaan dengan (*power with*) atau kemampuan membangun kerja sama dan solidaritas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Pemilihan lokasi dilakukan dengan sengaja (*purposive*). Hal ini

dilakukan dengan pertimbangan di Kecamatan Jati Agung terdapat kelompok wanita tani sebagai peserta Program P2L yang tidak mengalami peningkatan pendapatan setelah menjalani Program P2L. Responden dalam penelitian ini berjumlah 50 peserta Program P2L yang masing-masing tergabung dalam empat Kelompok Wanita Tani yaitu: Edelweis, Delima, Anggrek, dan Mekar Sari. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Adapun teknik analisis datanya adalah kuantitatif dengan statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan peserta Program P2L dari aspek tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*) dan tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*) tergolong dalam kategori tinggi. Sedangkan tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*) dan tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (*power with*) peserta Program P2L di Kecamatan Jati Agung masih tergolong dalam kategori sedang. Kesimpulannya, tingkat keberdayaan peserta Program P2L di Kecamatan Jati Agung perlu ditingkatkan dan dioptimalkan.

2.1.2 Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Desa Tarunajaya. Hardiansyah, Nurwati, dan Taftazani. 2023. Universitas Padjajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang adanya perbedaan tingkat pemberdayaan kelompok Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Desa Tarunajaya sebelum dan sesudah intervensi melalui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, serta secara umum untuk mengetahui apakah program itu efektif untuk meningkatkan pemberdayaan PRSE di Desa Tarunajaya.

Aspek-aspek yang dianalisis menggunakan teori *ACTORS* yang dikemukakan oleh Cook & Macaulay (1997) antara lain: *authority, confidence & competence, trust, opportunities, responsibilities, dan support*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini melibatkan 10 orang responden yang dipilih berdasarkan masuknya ke dalam kelompok PRSE berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No.24/HUK/1996. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasional, kuesioner, dan wawancara mendalam. Adapun teknik analisis datanya adalah uji beda *non parametric* dengan metode *Wilcoxon*. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan melalui pelatihan terbukti telah efektif. Hal tersebut digambarkan melalui adanya perbedaan tingkat keberdayaan sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan dengan menggunakan indikator-indikator pemberdayaan teori *ACTORS*.

2.1.3 Pemberdayaan Petani Desa Mekar Jaya dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Masyarakat Transmigrasi Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat). Roni, Damsid, & Jabar. 2022. Universitas Halu Oleo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya program pemberdayaan petani Desa Mekar Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta kondisi keberdayaan petani Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat. Aspek-aspek yang dianalisis menggunakan teori derajat keberdayaan menurut Suharto (2008) meliputi: tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*), tingkat kemampuan

meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*), tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*), dan tingkat kemampuan kerja sama dan solidaritas (*power with*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, di mana dengan melibatkan kepala desa, para petani, dan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya program pemberdayaan petani di Desa Mekar Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga ada enam yaitu: program pendidikan dan pelatihan, program penyuluhan dan pendampingan, program pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil-hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, program teknologi dan informasi, program penguatan kelembagaan petani. Adapun kondisi keberdayaan petani Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat ada empat, yaitu: kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*), kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*), kemampuan menghadapi hambatan (*power over*), kemampuan kerja sama dan solidaritas (*power with*).

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan

Banjarsari Kota Surakarta. Mansyur. 2021. Universitas Boyolali.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem penanganan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Aspek-aspek yang dianalisis menggunakan teori derajat keberdayaan menurut Suharto (2010) yang meliputi: tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*), tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*), tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*), dan tingkat kemampuan kerja sama dan solidaritas (*power with*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana dengan melibatkan camat, lurah, RT, RW, dan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Adapun teknik analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank sampah yang berada pada lingkungan kelompok masyarakat tersebut cenderung memiliki kinerja baik. Meskipun keuntungan ekonomi yang berikan bank sampah hanya sedikit, masyarakat tetap memanfaatkan bank sampah sebagai pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Selain itu, kapasitas organisasi lokal, khususnya Kelompok Pengelola Sampah di wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta masih belum baik karena masih belum efektifnya peran kelompok tersebut dalam melaksanakan program.

2.1.5 Hubungan Efektivitas Program Corporate Social Responsibility dengan Tingkat Keberdayaan Masyarakat. Loany & Murdianto. 2021. Institut Pertanian Bogor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program CSR PT Pertamina TBBM Bandung, tingkat keberdayaan masyarakat penerima program

CSR, serta hubungan efektivitas program *CSR* PT Pertamina TBBM Bandung dengan tingkat keberdayaan masyarakat di Desa Kertajaya. Aspek pertama yang diteliti adalah efektivitas tanggung jawab sosial perusahaan menurut Prayogo & Hilarius (2012) meliputi: tingkat manfaat, kesesuaian, keberlanjutan, dampak geografis, dan partisipasi. Aspek kedua adalah keberdayaan menurut Suharto (2005) meliputi: kekuasaan di dalam (*power within*) atau kesadaran dan keinginan untuk berubah, kekuasaan untuk (*power to*) atau kapasitas untuk memperoleh akses, kekuasaan atas (*power over*) atau kemampuan mengatasi hambatan, serta kekuasaan dengan (*power with*) atau kemampuan membangun kerja sama dan solidaritas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode sensus dengan mengumpulkan sampel dari seluruh populasi menggunakan kuesioner. Penentuan responden dilakukan dengan menjadikan 37 responden yang merupakan seluruh anggota populasi itu sendiri sebagai sampel dengan metode sensus, di mana responden tersebut adalah seluruh peserta program *CSR*. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui teknik wawancara mendalam kepada informan menggunakan panduan wawancara dengan informan terkait untuk dapat memahami dan menganalisis proses pelaksanaan *CSR*. Penetapan informan dilakukan melalui teknik bola salju (*snowball*). Pemilihan terhadap informan dilakukan secara sengaja (*purposive*) di antaranya yaitu kepada, staf *CDO* (*Community Development Officer*) PT Pertamina TBBM Bandung, Kepala Desa Kertajaya, tokoh desa terkait program *CSR*, ketua kelompok program, dan masyarakat

setempat melalui teknik wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan pada data kuantitatif adalah aplikasi *Microsoft Excel 2010* dan *SPSS 16.0 for windows*. Sedangkan pada data kualitatif menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat efektivitas program *CSR* dengan tingkat keberdayaan masyarakat. Pelatihan yang diberikan oleh program *CSR* meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Efektivitas program *CSR* PT Pertamina TBBM Bandung termasuk dalam kategori tinggi yaitu 48,6%. Ini didapat berdasarkan hasil akumulasi dari kelima indikator efektivitas *CSR* yang digunakan pada penelitian. Tiga dari lima indikator berada pada kategori sedang dan dua indikator lainnya berada pada kategori tinggi. Secara kuantitatif, tingkat manfaat dan tingkat keberlanjutan tinggi. Sedangkan pada tingkat kesesuaian, dampak, dan partisipasi berada kategori sedang. Pada hasil data yang diperoleh tidak ditemukan persentase kategori rendah yang dominan. Hasil data pengukuran pada tingkat keberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat penerima program *CSR* Kertajaya *Creative Destination* di Desa Kertajaya dikategorikan tinggi dengan persentase 51,4%. Hal tersebut terbukti dengan perubahan *softskill* dan mengalami pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dari hasil produksi produk. Terdapat hubungan yang sangat kuat dan nyata (terdapat hubungan) antara efektivitas program *CSR* dengan tingkat keberdayaan masyarakat dengan nilai korelasi yaitu 0,940** dan signifikansi

0,000. Program CSR yang dilaksanakan oleh CSR PT Pertamina TBBM Bandung dengan program Kertajaya *Creative Destination* terbukti mampu memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat penerima program CSR.

2.1.6 Keberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Pengolahan Sampah pada Kelompok PKK Kelurahan Sumbersari Jember. Ningati, Indrianti, & Hilmi. 2020. Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan antara pelatihan pengolahan sampah dengan keberdayaan perempuan pada kelompok PKK di Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember. Aspek-aspek yang dianalisis adalah pengaruh metode pelatihan dan keberdayaan, serta pengaruh media pelatihan dan keberdayaan.

Penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif, di mana dengan melibatkan 39 orang responden yang diambil dengan menggunakan teknik *total sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya adalah korelasi *Spearman* dengan *SPSS 22*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai interpretasi antara pelatihan pengolahan sampah dengan keberdayaan perempuan tergolong memiliki hubungan yang rendah. Nilai *r* hitung sebesar 0,324 masuk pada kriteria keempat antara 0,200-0,390. Rendahnya hubungan pelatihan dengan keberdayaan perempuan disebabkan singkatnya jarak pengambilan data keberdayaan perempuan dengan pelatihan pengolahan sampah. Hal ini berdampak pada data keberdayaan yang diperoleh tidak dapat menunjukkan peningkatan yang

signifikan karena diperlukan beberapa jeda waktu dan pendampingan secara berkelanjutan agar keberdayaan perempuan dapat terlihat. Pelatihan pengolahan sampah yang telah dilakukan berdampak positif pada perubahan pola pikir perempuan yang semakin maju, yaitu jika perempuan dapat menjadi agen perubahan hanya dengan mengolah sampah menjadi barang bermanfaat dengan nilai jual yang tinggi.

2.1.7 Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin. **Firmansyah. 2012. Universitas Lambung Mangkurat.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketercapaian indikator keberdayaan (derajat dan basis keberdayaan) dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin. Aspek pertama adalah derajat keberdayaan menurut Suharto (2008) meliputi: tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*); tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*); tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*); dan tingkat kemampuan kerja sama dan solidaritas (*power with*). Aspek kedua adalah basis keberdayaan menurut Friedman (1992) meliputi, yaitu pengembangan berbasis masyarakat; keberlanjutan; partisipasi masyarakat; pengembangan modal sosial masyarakat; dan penghapusan ketimpangan gender.

Penelitian ini adalah penelitian survei dan studi pustaka, di mana dengan melibatkan 30 orang responden yang diambil dengan menggunakan teknik *multistage sample random sampling* (acak sederhana bertingkat) dimulai dari

pemilihan kecamatan pelaksana program, kelurahan/desa pelaksana program, kelompok pelaksana program, dan yang terakhir individu pelaksana program. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Adapun teknik analisis datanya adalah kuantitatif dengan statistik deskriptif (rata-rata, median, dan indeks).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2FM yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin secara indeks tunggal (derajat dan basis keberdayaan) belum mampu mencapai indikator-indikator keberdayaan masyarakat (derajat dan basis keberdayaan). Selain itu, P2FM yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin secara indeks komposit (gabungan dari derajat dan basis keberdayaan) juga belum mampu mencapai indikator-indikator keberdayaan masyarakat, sehingga program tersebut belum layak disebut sebagai program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Ringkasan Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Relevansi dengan Penelitian Ini
Tingkat Keberdayaan Peserta Program P2L di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan oleh Pratiwi, Nurmayasari, Siliviyanti, dan Nikmatullah (2023).	Tingkat keberdayaan peserta Program P2L dari aspek tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (<i>power to</i>) dan tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (<i>power within</i>) tergolong dalam kategori tinggi. Adapun tingkat kemampuan menghadapi hambatan (<i>power over</i>) dan tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (<i>power with</i>) peserta Program P2L di Kecamatan Jati Agung masih tergolong dalam kategori sedang. Kesimpulannya, tingkat keberdayaan peserta Program P2L di Kecamatan Jati Agung perlu ditingkatkan dan dioptimalkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terhadap keberdayaan penerima manfaat suatu program • Teori terkait aspek yang diteliti • Metode penelitian kuantitatif deskriptif • Teknik pengumpulan data • Teknik analisis data 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Teknik pengambilan sampel • Jumlah sampel 	Penelitian ditujukan pada keberdayaan penerima manfaat program, meskipun program yang dimaksud adalah berbeda. Selain itu, keduanya menggunakan teori Suharto, namun dengan tahun terbit yang berbeda. Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian terdahulu yang menjadi penunjang kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.
Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Desa Tarunajaya oleh Hardiansyah, Nurwati, dan Taftazani (2023).	Secara keseluruhan menunjukkan bahwa program pemberdayaan melalui pelatihan terbukti telah efektif yang digambarkan melalui adanya perbedaan tingkat keberdayaan sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan dengan menggunakan indikator-indikator pemberdayaan teori <i>ACTORS</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terhadap keberdayaan penerima manfaat suatu program • Metode penelitian kuantitatif deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Teori terkait aspek yang diteliti • Teknik pengambilan sampel • Jumlah sampel • Teknik pengumpulan data • Teknik analisis data 	Penelitian ditujukan pada keberdayaan penerima manfaat program, meskipun program yang dimaksud adalah berbeda. Selain itu, teknik pengumpulan data keduanya menggunakan kuesioner. Tetapi, penelitian terdahulu ini menambahkan teknik pengambilan data berupa observasi dan wawancara mendalam.
Pemberdayaan Petani Desa Mekar Jaya dalam Upaya Meningkatkan	Upaya pemberdayaan petani di Desa Mekar Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga ada enam program, meliputi: program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terhadap keberdayaan penerima manfaat suatu program • Teori terkait aspek yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Metode penelitian • Teknik pengambilan sampel • Jumlah sampel 	Penelitian ditujukan pada keberdayaan penerima manfaat program, meskipun program yang dimaksud adalah berbeda. Selain itu, keduanya menggunakan teori

Penelitian Terdahulu	Ringkasan Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Relevansi dengan Penelitian Ini
Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Masyarakat Transmigrasi Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat oleh Roni, Damsid, dan Jabar (2022).	pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil-hasil pertanian, kemudahan akses iptek, dan penguatan kelembagaan petani. Adapun kondisi keberdayaan petani dilihat melalui kesadaran dan keinginan untuk berubah, kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses, kemampuan menghadapi hambatan, serta kemampuan kerja sama dan solidaritas.		<ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengumpulan data • Teknik analisis data 	Suharto, namun dengan tahun terbit yang berbeda.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta oleh Mansyur (2021).	Bank sampah yang berada pada lingkungan kelompok masyarakat tersebut cenderung memiliki kinerja baik karena meskipun keuntungan ekonomi yang berikan bank sampah hanya sedikit, masyarakat tetap memanfaatkan bank sampah sebagai pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Namun, kapasitas organisasi lokal, khususnya Kelompok Pengelola Sampah di wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta masih belum baik karena masih belum efektifnya peran kelompok tersebut dalam melaksanakan program.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terhadap keberdayaan penerima manfaat suatu program • Teori terkait aspek yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Metode penelitian • Teknik pengambilan sampel • Jumlah sampel • Teknik pengumpulan data • Teknik analisis data 	Penelitian ditujukan pada keberdayaan penerima manfaat program, meskipun program yang dimaksud adalah berbeda. Selain itu, keduanya menggunakan teori Suharto, namun dengan tahun terbit yang berbeda.
Hubungan Efektivitas Program Corporate Social Responsibility dengan Tingkat Keberdayaan	Terdapat hubungan antara tingkat efektivitas program CSR dengan tingkat keberdayaan masyarakat. Pelatihan yang diberikan oleh program CSR meningkatkan keterampilan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terhadap keberdayaan penerima manfaat suatu program • Teori terkait aspek yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Metode penelitian • Jumlah sampel • Teknik pengumpulan data • Teknik analisis data 	Penelitian ditujukan pada keberdayaan penerima manfaat program, meskipun program yang dimaksud adalah berbeda. Selain itu, keduanya menggunakan teori Suharto, namun dengan tahun terbit yang berbeda. Penelitian terdahulu

Penelitian Terdahulu	Ringkasan Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Relevansi dengan Penelitian Ini
Masyarakat oleh Loany dan Murdianto (2021).	meningkatkan ekonomi. Program <i>CSR</i> yang dilaksanakan oleh <i>CSR PT Pertamina TBBM Bandung</i> dengan program <i>Kertajaya Creative Destination</i> terbukti mampu memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat penerima program.			menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Namun, masih memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni terkait prosedur kuantitatif berupa teknik pengambilan sampel dan pengumpulan data (kuesioner).
Keberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Pengolahan Sampah pada Kelompok PKK Kelurahan Sumbersari Jember” oleh Ningati, Indrianti, dan Hilmi (2020).	Rendahnya hubungan pelatihan dengan keberdayaan perempuan disebabkan singkatnya jarak pengambilan data keberdayaan perempuan dengan pelatihan pengolahan sampah. Hal ini berdampak pada data keberdayaan yang diperoleh tidak dapat menunjukkan peningkatan yang signifikan karena diperlukan beberapa jeda waktu dan pendampingan secara berkelanjutan agar keberdayaan perempuan dapat terlihat. Pelatihan pengolahan sampah yang telah dilakukan berdampak positif pada perubahan pola pikir perempuan yang semakin maju, yaitu jika perempuan dapat menjadi agen perubahan hanya dengan mengolah sampah menjadi barang bermanfaat dengan nilai jual yang tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terhadap keberdayaan penerima manfaat suatu program • Metode penelitian kuantitatif • Teknik pengambilan sampel • Teknik pengambilan data • Teknik analisis data 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Teori terkait aspek yang diteliti • Jumlah sampel 	Penelitian ditujukan pada keberdayaan penerima manfaat program, meskipun program yang dimaksud adalah berbeda. Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian terdahulu yang menjadi penunjang kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.
Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin	P2FM yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin secara indeks tunggal (derajat dan basis keberdayaan) belum mampu mencapai indikator-indikator keberdayaan masyarakat (derajat dan basis keberdayaan). Selain itu, P2FM yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin secara	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terhadap keberdayaan penerima manfaat suatu program • Teori terkait salah satu aspek yang diteliti • Metode penelitian kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Teknik pengambilan sampel • Jumlah sampel • Teknik pengumpulan data 	Penelitian ditujukan pada keberdayaan penerima manfaat program, meskipun program yang dimaksud adalah berbeda. Teori terkait indikator dalam penelitian ini telah menjadi salah satu indikator dalam penelitian terdahulu, namun

Penelitian Terdahulu	Ringkasan Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Relevansi dengan Penelitian Ini
(P2FM) di Kota Banjarmasin” oleh Firmansyah (2012).	indeks komposit (gabungan dari derajat dan basis keberdayaan) juga belum mampu mencapai indikator-indikator keberdayaan masyarakat, sehingga program tersebut belum layak disebut sebagai program pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik analisis data 		dengan tahun terbit yang berbeda. Selain itu, teknik pengumpulan data keduanya menggunakan kuesioner. Tetapi, penelitian terdahulu ini tidak menggunakan studi dokumentasi sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini.

Sumber : Analisis oleh Peneliti (2024)

Setelah melakukan analisis terhadap 7 studi/penelitian terdahulu pada Tabel 2.1 tersebut, peneliti telah berhasil mempertimbangkan berbagai hal yang dianggap memiliki relevansi untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penelitian ini. Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan penelitian terdahulu tentang “Keberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Kewirausahaan Warung Makan Indomie oleh Poltekesos Bandung”.
2. Penelitian terdahulu Nomor 2.1.2 dan 2.1.6 tidak menggunakan teori keberdayaan oleh Suharto.
3. Penelitian terdahulu Nomor 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, dan 2.1.7 menggunakan teori keberdayaan oleh Suharto. Akan tetapi, di dalam penelitian tersebut menyebutkan kesadaran untuk berubah sebagai *power to* dan kemampuan untuk memperoleh akses sebagai *power within*. Hal ini bertentangan dengan teori asli/orisinal yang dikemukakan Suharto (2017) dalam Cetakan VI buku *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*.
4. Penelitian terdahulu Nomor 2.1.5 menggunakan teori keberdayaan oleh Suharto yang sama dengan penelitian ini.
5. Penelitian ini akan menggunakan teori keberdayaan oleh Suharto (2017) yang meliputi kesadaran untuk berubah (*power within*), kemampuan untuk memperoleh akses (*power to*), kemampuan untuk mengatasi hambatan (*power over*), dan kemampuan untuk bekerja sama (*power with*).

6. Teori keberdayaan oleh Suharto (2017) dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian mengenai “Keberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Kewirausahaan Warung Makan Indomie oleh Poltekesos Bandung”. Teori tersebut telah teruji pada penelitian sebelumnya. Selain itu, Edi Suharto adalah salah satu tokoh Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial yang terkemuka di Indonesia. Teori Beliau banyak dikutip oleh para ahli dan penulis dalam buku-buku dan artikel-artikel ilmiah.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

Teori yang relevan dengan penelitian terdiri dari teori tentang kemiskinan, pemberdayaan, keluarga, kewirausahaan, penyuluhan sosial, dan relevansi penelitian dengan praktik pekerjaan sosial.

2.2.1 Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan (Indika & Marliza, 2019). Lebih lanjut, Wulandari, et al. (2022) menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berkaitan erat dengan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan tersebut atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dengan demikian, pemahaman tentang kemiskinan perlu mempertimbangkan

berbagai aspek yang saling berkaitan, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga sosial dan struktural.

Kemiskinan harus dipahami dari berbagai sudut pandang. Pandangan kekurangan materi adalah yang utama, meliputi: kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan konsep ketidakmampuan, Wahab & Sudirman (2023) mengemukakan bahwa kemiskinan berarti keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terbatas akan biaya sekolah, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan untuk masa depan, tidak memiliki investasi, bahkan yang paling parah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara bebas.

Berdasarkan berbagai pengertian kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keterbatasan atau ketidakmampuan seseorang, individu, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kebutuhan pangan, sandang, papan, akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, tabungan masa depan, dan lain-lain.

2. Ciri-ciri Kemiskinan

Berbagai pengertian kemiskinan tersebut menekankan bahwa kemiskinan adalah konsep dan fenomena yang bersifat multidimensional. Berikut beberapa ciri dari kemiskinan yang berkaitan dengan multidimensional tersebut menurut The SMERU Research Institute dalam Suharto (2017), antara lain:

- a. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal
- b. Terbatasnya akses terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi
- c. Ketiadaan jaminan masa depan karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat personal maupun kolektif
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disertai keterbatasan sumber daya alam
- f. Minimnya partisipasi dalam aktivitas sosial kemasyarakatan
- g. Sulitnya mengakses lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan yang berkelanjutan
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial, seperti anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, serta kelompok marjinal dan terpencil.

3. Dimensi Kemiskinan

Dalam perspektif yang lebih luas lagi, kemiskinan dikemukakan ke dalam beberapa dimensi. Berikut beberapa dimensi kemiskinan menurut Cox (dalam Suharto, 2017), antara lain:

- a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi telah menciptakan kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam konteks kemiskinan. Dalam era ini, negara-negara maju cenderung memperoleh keuntungan lebih

besar, sementara negara-negara berkembang sering mengalami marginalisasi. Hal ini disebabkan oleh tuntutan persaingan dan pasar bebas menjadi landasan globalisasi. Akibatnya, negara-negara berkembang seringkali kesulitan bersaing di tingkat global, yang pada gilirannya dapat memperparah kondisi kemiskinan di wilayah tersebut.

- b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, yakni meliputi: kemiskinan akibat rendahnya pembangunan (kemiskinan subsisten), kemiskinan akibat dikesampingkannya pedesaan dalam proses pembangunan (kemiskinan pedesaan), serta kemiskinan yang disebabkan oleh hakikat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan (kemiskinan perkotaan).
- c. Kemiskinan sosial, yakni kemiskinan yang seringkali dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- d. Kemiskinan konsekuensial, yakni kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar kemiskinan. Beberapa di antaranya adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Berkaitan dengan empat dimensi yang telah dikemukakan sebelumnya, dimensi kemiskinan juga dapat dipandang dari aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis (Ellis dalam Suharto, 2017), antara lain:

- a. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Kemiskinan umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang dengan keuntungan non-

material yang diterima seseorang. Meskipun demikian, secara luas kemiskinan ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan akses pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan lain-lain.

- b. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan tersebut mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Kemiskinan secara politik ini berkaitan dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi kekuatan sosial berupa modal produktif/aset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan); sumber keuangan (pekerjaan, kredit); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial); jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa; pengetahuan dan keterampilan; serta informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.
- c. Secara sosial-psikologis, kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Aspek ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang menghambat/mencegah seseorang dalam memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor tersebut meliputi: rendahnya pendidikan, sifat malas, adanya hambatan budaya, hambatan birokrasi, dan lain-lain.

4. Penyebab Kemiskinan

Berikut adalah beberapa faktor penyebab kemiskinan menurut Wulandari, et al. (2022), antara lain:

- a. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang terutama disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi di suatu wilayah, di mana dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Ketika jumlah penduduk meningkat pesat, ketersediaan lapangan pekerjaan seringkali tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang tersedia. Situasi ini menciptakan persaingan yang lebih ketat dalam mencari pekerjaan, sehingga banyak individu mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai.
- b. Meningkatnya angka pengangguran, yakni laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas. Sehingga, angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat, di mana angka kemiskinan pun akan meningkat.
- c. Pendidikan yang rendah, yakni individu yang memiliki pendidikan yang rendah, cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Keterbatasan ini mengurangi daya saing mereka di pasar tenaga kerja, sehingga meningkatkan risiko pengangguran dan kemiskinan.
- d. Terjadinya bencana alam, yakni salah satu penyebab kemiskinan yang tidak dapat dihindari, di mana masyarakat yang terdampak bencana tersebut dapat kehilangan harta benda.

- e. Distribusi pendapatan yang tidak merata, yakni distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas dan rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan.

Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut, terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang terdiri dari kemiskinan natural, kultural, dan struktural (Kartasmita dan Baswir, dalam Rustanto, 2014).

- a. Kemiskinan natural, yakni keadaan masyarakat miskin karena telah miskin sejak awal. Kelompok yang mengalami kemiskinan ini tidak memiliki sumber daya yang memadai dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya pembangunan. Bahkan, jika dilibatkan dalam pembangunan pun umumnya akan mendapatkan imbalan yang sedikit. Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab kemiskinan natural adalah karena menyandang disabilitas, sakit, usia lanjut, dan bencana alam. Kondisi kemiskinan ini dapat disebut "*persistent poverty*" atau kemiskinan yang kronis bahkan turun temurun. Seringkali kondisi kemiskinan ini ditemukan di daerah yang terisolir dan kritis sumber daya.
- b. Kemiskinan kultural, yakni keadaan masyarakat miskin yang mengacu pada gaya hidup seseorang, di mana selalu merasa hidup berkecukupan dan tidak pernah kekurangan. Kelompok ini umumnya sulit diajak berusaha dan berpartisipasi dalam pembangunan. Akibatnya, tingkat pendapatan yang dimiliki tergolong rendah, di mana hal ini dipengaruhi juga oleh sikap malas, boros, dan tidak disiplin.

- c. Kemiskinan struktural, yakni keadaan masyarakat miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, meliputi: kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi, serta tatanan ekonomi yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Kemiskinan ini muncul disebabkan karena adanya upaya menanggulangi kemiskinan natural melalui berbagai program dan kebijakan. Namun, karena pelaksanaannya tidak merata, kesempatan yang tidak sama dan merata, sehingga memunculkan suatu ketimpangan. Hal ini juga dikenal sebagai “*accidental poverty*” yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijakan tertentu.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, meliputi: Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) (BPS, 2023). Berkaitan dengan penelitian berikut, Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo juga termasuk sebagai program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

- a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan evolusi dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang berfungsi sebagai sarana penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Kartu ini juga dapat merekam data penerima dan tabungan elektronik (*e-wallet*). KKS juga sudah digunakan oleh sebagian penerima PKH untuk memanfaatkan bantuan melalui ATM atau Agen Bank yang ditunjuk. Selain itu, penerima bantuan pangan juga dapat memanfaatkan KKS untuk mengambil

bantuan mereka di e-warong. Hal ini menunjukkan integrasi KKS dalam berbagai program bantuan sosial pemerintah..

- b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Program Sembako adalah inisiatif pemerintah dalam bentuk bantuan sosial pangan non-tunai yang ditujukan kepada keluarga penerima manfaat. Program ini menggunakan sistem *e-voucher* yang disalurkan melalui Bank Himbara, sehingga memungkinkan penerima untuk membeli bahan pangan seperti beras, telur, dan daging ayam di e-warong terdekat. Penerima memiliki kebebasan dalam memilih bahan pangan yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada tahun 2023, program ini masih berlanjut sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi, di mana setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp200.000,- per bulan, jumlah yang sama dengan tahun 2022. Keberlanjutan program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan keluarga yang membutuhkan.
- c. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). PIP melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau anak yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Program ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Dengan cakupan usia yang luas, PIP berupaya mendukung pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas, bahkan

hingga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

- d. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program PKH telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Pendekatan terpadu PKH dalam menangani aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial mencerminkan strategi komprehensif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang paling rentan.
- e. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kewirausahaan Warung Makan Indomie (Warmindo) adalah salah satu bentuk layanan dari program ATENSI secara umum, di mana ATENSI Kewirausahaan Warmindo merupakan yang ditujukan agar penerima manfaat dapat meningkatkan pendapatan melalui pengembangan kewirausahaan. Program ini pertama kali diluncurkan oleh Poltekesos Bandung selaku representatif Kementerian Sosial dengan bekerja sama dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Adapun komponen dalam program ini adalah pelatihan vokasional/pembinaan kewirausahaan dan bantuan/asistensi sosial. Penerima manfaat program ini menerima peralatan

dan bahan usaha meliputi: gerobak, buleng mie ayam, kompor gas, selang dan regulator, tabung gas, peralatan makan, wajan, pisau, centong sup, aneka jenis mie instan, minuman *sachet*, dan lain-lain.

2.2.2 Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh sebab itu, ide utama pemberdayaan tidak pernah terlepas dari konsep mengenai kekuasaan. Kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, meliputi:

- a. Kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, maka proses pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan bersifat dinamis, bukan statis (Suharto, 2017).

Banyak pakar yang telah mengemukakan pendapat mengenai konsep pemberdayaan. Jika dilihat dari akar katanya, “*daya*” merupakan kata dasar yang ditambahkan awalan “*ber*” yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan kekuatan/tenaga, sehingga berdaya berarti mempunyai kekuatan/tenaga (Maryani & Nainggolan, 2019). Adapun Zubaedi (dalam Nurhakim, Gunawan, & Wibowo, 2023) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan

potensi itu menjadi tindakan nyata. Sependapat dengan hal tersebut, Webster mengartikan *empowerment* menjadi dua, yaitu:

- a. *To give ability or enable to*, yaitu memberi kemampuan/kecakapan untuk melakukan sesuatu
- b. *To give power of authority to*, yaitu memberi kewenangan/kekuasaan (*Oxford English Dictionary*, dalam Maryani & Nainggolan, 2019).

Suharto (2017) menyatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 2017):

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kelompok yang lemah atau kurang beruntung dalam masyarakat (Ife, 1995).
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi, mengontrol, dan mempengaruhi lembaga serta peristiwa

yang berdampak pada kehidupan mereka. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, Jorgensen, & Hernandez, 1994).

- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift & Levin, 1987).
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Menurut Ife (dalam Suharto, 2017), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum tau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga: kemampuan untuk menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

- e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Setiap manusia/individu dalam masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Berkaitan dengan potensi, pemberdayaan berarti suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah orang yang lemah dan rentan menjadi semakin lemah dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat.

Dalam konsep pemberdayaan, melindungi dan berpihak pada individu-individu yang lemah adalah hal utama, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan melalui proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan meminta bantuan pihak yang lebih mampu dan berkuasa, sehingga terjadi keseimbangan dalam masyarakat dan proses belajar bersama demi mewujudkan kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif, serta sejahtera secara berkelanjutan (Kartasmita dalam Haryanto, Danial, & Hamdan, 2022; Ginting, Sembiring, Arlina, Dewi, & Kristian, 2022).

Masyarakat yang berdaya adalah hasil yang diharapkan dari upaya pemberdayaan yang dilaksanakan. Keberdayaan masyarakat berkaitan dengan

keadaan masyarakat yang telah memiliki *power* (kekuatan/kemampuan) sebagai hasil dari pemberdayaan karena kondisi semula yang tidak berdaya (*powerless*). Ketika masyarakat memiliki *power* atau kemampuan, sesungguhnya telah ada kesadaran kritis dalam diri seseorang yang dapat dicapai dengan cara melihat diri sendiri, serta menggunakan apa yang dilihat, didengar, dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya (Harry Hikmat dalam Andreas & Savitri, 2016).

Menurut Friedman (dalam Rohima, 2015) karakteristik individu yang berdaya dapat digambarkan melalui serangkaian kemampuan kritis. Seseorang dianggap berdaya ketika mereka mampu melakukan analisis mandiri terhadap permasalahan yang dihadapi, tidak hanya mengidentifikasi masalah tersebut, tetapi juga memahami akar penyebab dan konsekuensinya. Lebih lanjut, individu yang berdaya memiliki kapasitas untuk menetapkan skala prioritas dalam menangani berbagai masalah, menunjukkan kemampuan pengambilan keputusan yang efektif. Yang tidak kalah pentingnya, proses ini juga memungkinkan mereka untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan baru, mencerminkan aspek pembelajaran berkelanjutan dalam pemberdayaan. Adapun ciri-ciri masyarakat yang memiliki keberdayaan menurut Friedman ditandai dengan hal-hal berikut:

- a. Kekuatan mengaktualisasikan diri, yaitu mampu mengekspresikan diri dan mampu menginternalisasikan hasil penilaian
- b. Koaktualisasi eksistensi masyarakat, berupa gejala-gejala perilaku yang menunjukkan bahwa adanya aktualisasi bersama dalam kelompok atau

komunitas atau masyarakat yang berimplikasi pada eksistensi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial di lingkungannya.

Adapun Sumardjo (dalam Zulkifli & Makmur, 2015) menyebutkan ciri-ciri masyarakat yang berdaya, antara lain:

- a. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
- b. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
- c. Memiliki kekuatan untuk berunding
- d. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan
- e. Bertanggung jawab atas tindakannya.

Masyarakat berdaya dicirikan oleh serangkaian kemampuan dan sikap yang kompleks, mencerminkan tingkat kesadaran dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Karakteristik ini meliputi pemahaman yang mendalam tentang situasi mereka, motivasi intrinsik yang kuat, kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan peluang, serta energi untuk bertindak. Mereka juga menunjukkan kecakapan dalam berkolaborasi, fleksibilitas dalam mempertimbangkan berbagai alternatif, ketegasan dalam pengambilan keputusan, dan keberanian dalam menghadapi risiko. Lebih lanjut, masyarakat berdaya memiliki kemampuan untuk mengakses dan mengolah informasi secara efektif, serta beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi. Slamet (dalam Sekarrini & Siswanto, 2020) menekankan bahwa pembentukan masyarakat dengan karakteristik tersebut bukan proses instan, melainkan membutuhkan upaya

pemberdayaan yang berkelanjutan. Kunci dari proses ini adalah optimalisasi partisipasi masyarakat yang dilandasi rasa tanggung jawab. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam setiap tahap pemberdayaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Konsep keberdayaan yang diberikan para ahli pada dasarnya memiliki prinsip yang sama yaitu memberdayakan kelompok yang lemah dan tidak berdaya untuk lebih mandiri dan mampu menolong diri sendiri, hingga suatu saat mampu menolong orang lain. Berdasarkan rangkaian konsep keberdayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi berdaya adalah keadaan di mana terdapat kesadaran dan keinginan dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik, kemampuan untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan kapanpun dan di manapun, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (termasuk mencegah dan mengidentifikasi masalah), serta kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain (termasuk menjalankan tanggung jawab sesuai peranan).

2. Indikator Keberdayaan

Memahami indikator keberdayaan merupakan langkah krusial dalam merancang dan mengevaluasi program pemberdayaan sosial yang efektif. Indikator-indikator keberdayaan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat keberdayaan seseorang atau kelompok, sehingga upaya pemberdayaan dapat diarahkan secara tepat pada aspek-aspek yang memerlukan peningkatan. Dengan mengetahui indikator-indikator ini, para pelaksana program dapat mengidentifikasi area-area spesifik yang perlu dioptimalkan dalam kelompok

sasaran, seperti keluarga miskin, guna mencapai hasil pemberdayaan yang optimal dan terukur.

Schuler, Hashemi dan Riley (dalam Suharto, 2017) mengembangkan 8 indikator pemberdayaan yang disebut *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Kerangka ini terdiri dari delapan indikator yang mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu: kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil dan besar, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, kebebasan relatif dari dominasi keluarga, kesadaran hukum dan politik, partisipasi dalam kampanye dan aksi protes, serta jaminan ekonomi dan kontribusi dalam keluarga. Indeks ini menawarkan pendekatan holistik dalam menilai keberdayaan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tingkat pemberdayaan individu atau kelompok dalam masyarakat.

Berkaitan dengan 8 indikator tersebut, secara lebih rinci keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dianalisis dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, serta kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, antara lain:

- a. *Power within* / kekuasaan di dalam meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah.
- b. *Power to* / kekuasaan untuk meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses.

c. *Power over* / kekuasaan atas perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro; kekuatan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

d. *Power with* / kekuasaan dengan meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro (Suharto, 2017).

Tabel 2.2 Indikator Keberdayaan

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah.	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya • Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara • Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan diri dan kebahagiaan • Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara • Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain • Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Assertiveness</i> dan otonomi • Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum, dan pengucilan politik • Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum, dan politik
Kekuasaan untuk meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses.	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pelayanan keuangan mikro • Akses terhadap pendapatan • Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga • Akses terhadap pasar • Penurunan beban pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan, termasuk kemelekan huruf • Status kesehatan dan gizi • Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi • Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah • Pengetahuan mengenai proses hukum, politik, dan kebudayaan • Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik, dan kebudayaan
Kekuasaan atas perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro; kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya • Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana • Aksi individu untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat • Keterlibatan individu dan pengambilan peran

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.	yang lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga • Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga • Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar 	mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat	dalam proses budaya, hukum, dan politik
Kekuasaan dengan meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro.	<ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern • Mampu memberi gaji terhadap orang lain • Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar, dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga • Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis • Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat • Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, dan hukum pada tingkat masyarakat dan makro

Sumber : Suharto (2017:65)

3. Strategi Pemberdayaan

Menurut Mardikanto & Soebiato (2017:167), strategi dalam sehari-hari sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:

- a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat

- c. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan ketiga arah strategi di atas, maka pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan dengan strategi-strategi berikut:

- a. Menyusun instrumen pengumpulan data dengan informasi berupa hasil penelitian terdahulu, referensi yang ada, dan hasil temuan dari pengamatan lapang.
- b. Membangun pemahaman dan komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga, dan masyarakat
- c. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2017:169)

Parsons, Jorgensen, & Hernandez (dalam Suharto, 2017:66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, serta tidak ada literatur yang menyebutkan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien. Meskipun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*), antara lain:

- a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah

membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

b. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai startegi sistem besar (*large-system strategy*) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi diri sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak

4. Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, meliputi:

a. Pemungkinan: berfokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal potensi masyarakat. Ini melibatkan penghapusan

hambatan kultural dan struktural, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara bebas.

- b. Penguatan: menekankan peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah, serta mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya secara efektif. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha (Suharto, 2017).

Beberapa cara yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- a. Membangun relasi pertolongan yang: merefleksikan respons empati; menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasib sendiri (*self-determination*); menghargai perbedaan dan keunikan individu; serta menekankan kerjasama klien (*client partnerships*).
- b. Membangun komunikasi yang: menghormati martabat dan harga diri klien; mempertimbangkan keragaman individu; berfokus pada klien; serta menjaga kerahasiaan klien.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; menghargai hak-hak klien; merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; serta melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: ketaatan terhadap kode etik profesi; keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan (DuBois & Miley dalam Suharto, 2017).

2.2.3 Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan institusi yang terbentuk atas ikatan perkawinan yang terdiri dari suami dan istri yang secara sah karena pernikahan hidup bersama-sama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera secara lahir dan batin (Noorsyarifa & Santoso, 2023). Secara lebih luas, keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat dalam perkawinan, hubungan darah atau adopsi, anggota

keluarga yang tinggal satu atap, ada interaksi dan komunikasi sesuai dengan peran masing-masing, serta mewariskan kebiasaan atau budaya secara umum dan mempraktikkan dengan cara tersendiri (Burgess dan Soemanto dalam Clara & Wardani, 2020).

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, kakek, dan nenek. Keluarga mempunyai kebersamaan seperti pertalian darah/ikatan keluarga, emosional, hingga terdapat perhatian/asuhan (Reisner; Bentler, et al.; Suprajitno dalam Clara & Wardani, 2020).

2. Fungsi Keluarga

Bishop (dalam Yulianti, Noviar, & Muslim, 2022) menjelaskan bahwa terdapat tujuh fungsi keluarga, meliputi: *problem solving*, *communication*, *roles*, *affective responsiveness*, *affective involvement*, *behavior control*, dan *general functioning*.

- a. *Problem solving*, yakni pemecahan masalah yang mengacu pada kemampuan keluarga untuk menyelesaikan masalah ke tingkat yang mempertahankan fungsi keluarga yang efektif. Masalah keluarga adalah masalah yang mengancam integritas dan kapasitas fungsional keluarga dan yang sulit dipecahkan oleh keluarga.
- b. *Communication*, yakni pertukaran informasi di antara anggota keluarga. Keluarga berkomunikasi secara jelas dan langsung di bidang instrumental dan

afektif. Jika yang terjadi kurang efektif, maka keluarga berkomunikasi dengan kurang jelas dan kurang langsung.

- c. *Roles*, yakni peran terkait pola perilaku berulang yang digunakan anggota keluarga untuk memenuhi fungsi keluarga. Keluarga harus berurusan dengan beberapa fungsi berulang kali untuk menjaga sistem yang sehat dan efektif.
- d. *Affective responsiveness*, yakni menilai sejauh mana anggota keluarga individu dapat mengalami pengaruh yang sesuai pada berbagai rangsangan, baik kesejahteraan dan emosi darurat.
- e. *Affective involvement*, yakni keterlibatan afektif berkaitan dengan tingkat ketertarikan dan penghargaan anggota keluarga terhadap aktivitas dan perhatian satu sama lain. Keluarga yang sehat memiliki tingkat keterlibatan yang seimbang, tidak terlalu sedikit atau berlebihan. Keterlibatan empatik dianggap sebagai bentuk yang paling efektif dan sehat.
- f. *Behavior control*, yakni cara keluarga mengekspresikan dan mempertahankan standar perilaku anggota-anggotanya. Perilaku dalam situasi yang berbeda-beda (berbahaya, psikologis dan sosial) juga dianggap sebagai pola kontrol yang berbeda (fleksibel, kaku, psikologis dan sosial).
- g. *General functioning*, yakni kesehatan atau pantologi keluarga secara keseluruhan. Keluarga yang ideal memiliki syarat yaitu setiap anggota hendaknya menciptakan dan merasakan hidup tenang dan bahagia, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban masing-masing, saling menghormati hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, terdapat pembagian tugas kerja sesuai dengan porsinya, memiliki waktu yang cukup untuk berkumpul bersama

keluarga, komunikasi lancar dalam keluarga, serta perlu ada bimbingan, pembinaan, dan pengawasan dalam keluarga.

3. Ciri-ciri Keluarga

Ciri-ciri umum keluarga menurut Mac Iver & Page (dalam Clara & Wardani, 2020), antara lain:

- a. Didasari oleh ikatan pernikahan
- b. Terbentuk dari struktur institusional terkait pernikahan yang sengaja dibuat dan dipertahankan
- c. Memiliki sistem penamaan, termasuk cara menghitung garis keturunan
- d. Menerapkan aturan ekonomi khusus untuk kebutuhan anggotanya, terutama terkait reproduksi dan pengasuhan anak
- e. Berbagi tempat tinggal bersama
- f. Merupakan tempat tinggal bersama.

Lebih lanjut, terdapat ciri-ciri lain yang dimiliki keluarga, meliputi:

- a. Kebersamaan, yakni keluarga merupakan bentuk yang hampir paling universal di antara bentuk-bentuk organisasi lainnya. Hampir setiap keadaan manusia mempunyai keanggotaan dari beberapa keluarga.
- b. Dasar-dasar emosional, yakni keluarga didasarkan pada suatu dorongan yang sangat mendalam dari sifat organis manusia seperti perkawinan, menjadi ayah, kesetiaan akan maternal dan perhatian orang tua.
- c. Pengaruh perkembangan, yakni lingkungan kemasyarakatan yang paling awal dari semua bentuk kehidupan yang lebih tinggi, termasuk manusia, dan

pengaruh perkembangan yang paling besar dalam kesadaran hidup yang merupakan sumbernya.

- d. Ukuran yang terbatas, yakni keluarga merupakan kelompok yang terbatas ukurannya, yang dibatasi oleh kondisi-kondisi biologis yang tidak dapat lebih tanpa kehilangan identitasnya. Oleh sebab itu, keluarga merupakan skala yang paling kecil dari semua organisasi formal yang merupakan struktur sosial, dan khususnya dalam masyarakat yang sudah beradab dan keluarga secara utuh terpisah dari kelompok kekerabatan.
- e. Tanggung jawab para anggota, yakni keluarga memiliki tuntutan-tuntutan yang lebih besar dan berkelanjutan daripada yang biasa dilakukan oleh asosiasi lainnya.
- f. Aturan kemasyarakatan, yakni terjaga dengan adanya hal-hal tabu di dalam masyarakat dan aturan-aturan sah yang dengan kaku menentukan kondisi-kondisinya.
- g. Sifat kekekalan dan kesementaraan, yakni keluarga sebagai institusi merupakan sesuatu yang permanen dan universal. Keluarga sebagai asosiasi merupakan organisasi yang paling bersifat sementara dan yang paling mudah berubah dari seluruh organisasi-organisasi penting lainnya dalam masyarakat (Mac Iver & Page dalam Evy & Wardani, 2020).

4. Bentuk-bentuk Keluarga

Menurut Suprajitno (dalam Clara & Wardani, 2020), secara tradisional, keluarga dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Keluarga inti (*nuclear family*) adalah keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diperoleh dari keturunannya, adopsi atau keduanya.
- b. Keluarga besar (*extend family*) adalah keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah (kakek-nenek, paman-bibi)
- c. Keluarga *polygamous* adalah lebih dari satu keluarga inti yang tinggal bersama dan dipimpin oleh satu kepala keluarga.

Dengan berkembangnya peran individu dan meningkatnya rasa individualisme, pengelompokan tipe keluarga selain ketiga di atas telah berkembang menjadi:

- a. Keluarga bentukan (*dyadic family*) adalah keluarga baru yang terbentuk dari pasangan yang telah cerai atau kehilangan pasangannya.
- b. Orang tua tunggal (*single parent family*) adalah keluarga yang terdiri dari salah satu orang tua dengan anak-anak akibat perceraian atau ditinggal pasangannya.
- c. Ibu dengan anak tanpa perkawinan (*the unmarried teenage mother*) adalah orang dewasa laki-laki atau perempuan yang tinggal sendiri tanpa pernah menikah (*the single adult living alone*). Kecenderungan di Indonesia juga meningkat dengan dalih tidak mau direpotkan oleh pasangan atau anaknya kelak jika telah menikah.
- d. Keluarga dengan anak tanpa menikah sebelumnya (*the non-marital heterosexual cohabiting family*)
- e. Keluarga yang dibentuk oleh pasangan yang berjenis kelamin sama (*gay and lesbian family*).

2.2.4 Kewirausahaan

1. Pengertian Kewirausahaan

Secara harfiah, wira berarti berani dan usaha berarti daya upaya. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya (Hastuti, et al., 2020).

Adapun secara sederhana kewirausahaan berarti kemampuan berdagang. Secara definitif, kewirausahaan diartikan sebagai kemampuan memproduksi produk, menjual produk, dan membangun pangsa pasar sendiri (Wulanda, 2020). Berdasarkan pengertian tersebut, maka usaha tidak hanya sekadar berjualan, namun menuntut banyak kemampuan. Setidaknya dapat menghasilkan suatu produk, menjual produk tersebut kepada konsumen, dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan (Aziz, Wahyuni, Efiyanti, & Wargadinata, 2020).

Schumpeter (dalam Alma, 2019) menyatakan bahwa wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, baik dengan menciptakan organisasi yang baru maupun mengolah bahan baku yang baru. Wirausaha mampu melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Proses kewirausahaan itu sendiri meliputi berbagai kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang wirausaha adalah orang yang harus mampu melihat adanya peluang, menganalisis peluang, dan mengambil keputusan untuk mencapai keuntungan yang berguna bagi dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya, termasuk kelanjutan usahanya sebelum peluang tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Wirausaha yang berhasil biasanya memacu sebuah mimpi dan berusaha merealisasikannya karena adanya kepercayaan yang tinggi akan kesuksesan yang dapat diraih.

2. Pengertian Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial menekankan pada kemampuan seseorang atau kelompok dalam bermacam-macam sumber daya untuk melakukan inovasi guna mengembangkan dan menerapkan ide solutif terhadap berbagai isu atau masalah yang diharapkan nantinya dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatasi masalah sosial tersebut (Haliwela & Nulhaqim, 2023). Konsep kewirausahaan sosial memiliki dua aspek penting, antara lain:

- a. Adanya inovasi sosial yang berpotensi untuk mengubah sistem yang terdapat dalam masyarakat
- b. Adanya individu yang memiliki visi yang kuat, kreatif, memiliki semangat berwirausaha, dan beretika (Drayton dalam Darwis, et al., 2022).

Kewirausahaan sosial memiliki kesinambungan dengan pekerjaan sosial, di mana kewirausahaan sosial adalah kondisi bagaimana cara melihat potensi dan masalah di lingkungan, kemudian mencari cara kreatif dan inovatif untuk bisa meningkatkan kondisi sosial yang ada di masyarakat, dengan adanya pekerjaan sosial yang berfungsi memberikan pelayanan sosial atau sebagai pekerjaan yang

bisa membantu masalah sosial baik itu di individu ataupun kelompok. Pekerja sosial dapat menjadi penyedia pelayanan sosial dengan melibatkan berbagai sumber-sumber yang dibutuhkan didalam pelaksanaan kewirausahaan sosial itu sendiri (Haliwela & Nulhaqim, 2023).

Kewirausahaan sosial mengedepankan pada inovasi, kreativitas, kolaborasi, pengembangan jaringan, serta peluang baru. Kewirausahaan sosial tidak selalu berfokus pada keuntungan finansial, tetapi dengan tujuan mulia untuk misi sosial. Pada banyak kasus, wirausahawan sosial bahkan sering menciptakan jalan keluar berkelanjutan bagi permasalahan sosial (Darwis, et al., 2022).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Dhewanto (dalam Fuaida, 2019) telah mengemukakan hal yang sama dengan berbagai pernyataan di atas. Terdapat beberapa komponen yang membentuk definisi dan konsep kewirausahaan sosial, meliputi: *innovation* (inovasi), *opportunity* (kesempatan), *leadership* (kepemimpinan), *value creation* (penciptaan nilai), *social benefit* (kebermanfaatan sosial), dan *profitability* (keuntungan). Kebermanfaatan sosial ini merupakan ciri utama dari kewirausahaan sosial.

3. Tujuan Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan memiliki berbagai tujuan yang bervariasi sesuai dengan konteks dan tujuan organisasi atau individu yang terlibat. Terdapat banyak hasil optimal yang bisa didapatkan dari kemampuan kewirausahaan. Berikut beberapa tujuan dari pengembangan kewirausahaan antara lain:

- a. Mengoptimalkan kapasitas, yakni seorang wirausaha wajib memiliki mental kuat dalam menjalankan usahanya baik dalam menghadapi risiko maupun

dalam proses pengambilan suatu keputusan. Kesempatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik akan terbuka lebar di saat pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

- b. Memperoleh keuntungan, yakni usaha yang berkembang secara otomatis akan memberikan keuntungan optimal dari hasil kerja keras yang dilakukan. Hal ini dapat menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam mengembangkan bisnis agar mendapatkan keuntungan yang lebih lagi.
- c. Menganalisis risiko, yakni seorang wirausaha wajib memiliki daya analisis yang baik terhadap apa yang dikerjakan, mulai dari analisis risiko, adanya persaingan kompetitor, penentuan nilai jual produk, kemampuan melihat peluang pasar, dan pengetahuan terhadap perkembangan teknologi informasi. Pengembangan bisnis akan memberikan banyak pengalaman yang dijadikan acuan dalam menghadapi risiko dan tantangan, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi.
- d. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan, yakni kemampuan dalam pengembangan kewirausahaan yang baik tidak terlepas dari jiwa kepemimpinan yang baik dalam mengorganisir manajemen yang dikelola, mulai dari sistem pengelolaan finansial yang penuh perhitungan, strategi pemasaran yang baik, manajemen sumber daya, hingga terkait pengambilan keputusan yang tepat agar berbagai risiko yang tidak diinginkan dapat dihindari (Rachmat, et al., 2023).

Jika dilihat dari sudut pandang individu selaku wirausaha, maka tujuan seseorang berwirausaha adalah sebagai berikut:

- a. Berniat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain agar menjadi wirausaha yang mandiri
- b. Membuat usaha baru yang membutuhkan tenaga kerja produktif sebanyak-banyaknya
- c. Meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan masyarakat di sekitar bisnis dengan memberi kesempatan untuk berpartisipasi bersama dalam bisnis
- d. Memotivasi orang lain dan memberi semangat wirausaha
- e. Membantu dan mendampingi pengusaha muda dalam berinovasi dan berkreasi agar usaha semakin berkembang dan maju (Siagian, et al., 2020).

4. Manfaat Kewirausahaan

Selain mendatangkan keuntungan bagi para pelakunya, kewirausahaan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran
- b. Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan lain-lain
- c. Menjadi pribadi unggul yang patut diteladani karena sebagai seorang wirusaha yang terpuji, jujur, berani, dan hidup tanpa merugikan orang lain
- d. Memberi contoh bagaimana bekerja keras, tetapi tidak melupakan perintah-perintah agama dan dekat dengan Tuhan
- e. Selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu menjaga dan membangun lingkungan

- f. Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dalam bidang pembangunan sosial, sesuai dengan kemampuannya
- g. Berusaha mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, dan tekun dalam menghadapi pekerjaan.
- h. Hidup tidak berfoya-foya dan tidak boros
- i. Memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan (Alma, 2019).

5. Ruang Lingkup Kewirausahaan

Ruang lingkup kewirausahaan mencakup bermacam aspek dan elemen yang berkaitan dengan kegiatan menciptakan, mengembangkan, dan mempertahankan sebuah usaha dan bisnis. (Rachmat, et al., 2023) mengemukakan beberapa ruang lingkup kewirausahaan, yaitu:

- a. Perencanaan bisnis, yakni melibatkan pengembangan rencana bisnis yang mencakup penciptaan ide bisnis yang inovatif, visi, misi, tujuan, sumber daya, keuangan, dan strategi yang berpotensi dalam pencapaian kesuksesan usaha.
- b. Modal bisnis, yakni mencakup identifikasi terkait sumber-sumber pendanaan atau pembiayaan yang diperlukan untuk mendirikan dan mengembangkan suatu bisnis. Mulai dari modal pribadi, pinjaman, atau melibatkan investor.
- c. Pembentukan bisnis, yakni mencakup proses formalisasi bisnis. Misalnya, pemilihan struktur perusahaan: apakah perusahaan perseorangan, perseroan terbatas, atau koperasi. Selain itu, perlu dilakukan pendaftaran perusahaan dan pemenuhan persyaratan hukum.

- d. Manajemen, yakni kewirausahaan melibatkan pengelolaan operasional sehari-hari dalam menjalankan bisnis, baik manajemen waktu, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, hingga manajemen operasional. Dalam manajemen pemasaran khususnya diperlukan strategi dalam memasarkan dan mempromosikan produk kepada pelanggan potensial sehingga penjualan dapat berjalan dengan efektif.
- e. Inovasi dan pengembangan, yakni kewirausahaan tidak terlepas dari proses kreatifitas dan inovasi dalam menciptakan nilai tambah suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mengatasi masalah tertentu. Pengembangan bisnis dapat dilakukan melalui proses perencanaan desain produk baru, melakukan riset pasar untuk mengetahui tren yang berkembang dan tetap relevan dengan pasar, serta peluang dan tantangan dari pesaing bisnis.
- f. Peningkatan keterampilan, yakni seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, seperti kreatifitas, kemampuan berpikir kritis, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan dalam berkomunikasi. Peningkatan keahlian melibatkan pembelajaran berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop terkait kewirausahaan dalam mengikuti perkembangan industri dan teknologi.

Secara umum, ruang lingkup kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang nilai dan kapasitas dari perilaku seseorang dalam menghadapi berbagai risiko agar dapat menemukan peluang berwirausaha. Ruang lingkup kewirausahaan sangat luas dan beragam, tergantung pada jenis industri dan tujuan bisnisnya. Seorang wirausaha harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan

tantangan yang mungkin muncul selama perjalanan bisnis yang digeluti. Dengan demikian, dibutuhkan keberanian dan tanggung jawab dalam menghadapi risiko yang terjadi (Rachmat, et al., 2023).

6. Sifat-sifat yang Perlu Dimiliki oleh Wirausaha

Seorang wirausaha memiliki hubungan yang luas dengan masyarakat yang berpotensi pada peningkatan volume usaha dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Zimmerer, et al., (dalam Siagian, et al., 2020) berpendapat bahwa seorang wirausaha harus memiliki sifat sebagai berikut:

- a. *Vision*, yakni wirausaha harus memiliki impian yang kuat tentang usahanya dan mampu menerapkan tentang tata cara dan sarana untuk mencapai mimpi itu.
- b. *Knowledge*, yakni wirausaha harus memiliki pengetahuan konseptual tentang semua teknis bisnis yang dijalankannya, meliputi: bidang teknologi, operasional, bidang keuangan, serta dinamika pasar. Hal ini merupakan gambaran bahwa sebagai seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk mengetahui atau menciptakan peluang dan mengambil tindakan tertentu dengan tujuan untuk mewujudkan produk yang inovatif.
- c. *Desire to succeed*, yakni wirausaha harus memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Impian yang dimiliki tidak hanya terbatas pada satu tujuan saja, tetapi terus bekerja untuk mencapai tujuan lain yang lebih tinggi.
- d. *Independence*, yakni wirausaha harus memiliki kemandirian dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu dalam pengambilan keputusan. Mereka

dapat mengambil keputusan sendiri serta keuntungan sendiri sesuai dengan perhitungan yang dibuatnya.

- e. *Optimism*, yakni wirausaha harus memiliki rasa optimis yang tinggi tentang visi yang telah dibuat. Dengan jiwa optimisme seseorang akan menjadi lebih semangat dalam berusaha akan membuka daya kreativitas untuk berinovasi lebih sehingga akan lahir ide-ide dan strategi baru bagi pencapaian usahanya.
- f. *Value addition*, yakni wirausaha tidak mengikuti aturan secara umum dalam melaksanakan usahanya. Wirausaha memiliki keinginan yang kuat dalam memperkenalkan sesuatu yang baru untuk bisnis yang dijalankannya. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menciptakan dan berinovasi atau bahkan menambah nilai pada produk/jasa yang ada agar lebih dikenal di pasaran.
- g. *Leadership*, yakni wirausaha harus memiliki kemampuan dalam manajemen untuk memengaruhi, mengarahkan, memberikan motivasi yang baik, serta untuk mengawasi orang lain dalam melaksanakan tanggungjawab serta mampu sebagai perencana yang baik dan mampu berkomunikasi dengan baik pada banyak orang untuk melaksanakan tujuannya.
- h. *Hardworking*, yakni wirausaha terkadang tidak mengenal waktu tertentu dalam melakukan pekerjaan, bahkan sering dikatakan pula bahwa sebagai wirausaha harus mau untuk bekerja keras. Wirausaha harus mampu bekerja secara sungguh-sungguh dan tidak mengenal lelah sebelum target tercapai, serta memperhatikan kepuasan hasil yang telah dilakukan.
- i. *Desire to have control over their own fate*, yakni wirausaha mempunyai keinginan untuk mampu mengontrol nasib mereka sendiri, sehingga tidak ingin

bergerak dalam wilayah tertentu tetapi ingin membuka jalan sesuai keinginan mereka sendiri. Wirausaha tidak bergantung pada keberuntungan atau takdir, tetapi berusaha menciptakan takdir mereka sendiri.

- j. *Risk taking ability*, yakni wirausaha memiliki kemampuan dalam mengambil risiko, di mana hal ini merupakan bagian yang paling menyeluruh dalam mendefinisikan karakter kewirausahaan.

2.2.5 Penyuluhan Sosial

1. Pengertian Penyuluhan Sosial

Penyuluhan dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang sekaligus berfungsi sebagai tindakan praktis. Dalam konteks ini, penyuluhan memiliki basis ilmiah yang kuat, yang berasal dari ilmu tentang perilaku atau *behavioral science*. Ilmu ini mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan perilaku manusia, termasuk pola pikir, tindakan, serta sikap yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok ketika mereka menghadapi berbagai tantangan dan situasi dalam kehidupan mereka. Penyuluhan tidak hanya sekadar transfer informasi, tetapi juga merupakan proses yang mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dari perilaku manusia untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam konteks kesejahteraan sosial (Sugiyanto, et al., 2018).

Penyuluhan sosial dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial berfungsi sebagai langkah awal yang fundamental untuk mencapai tujuan. Penyuluhan sosial ditujukan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial, terutama

pada tingkat lokal. Sebagai langkah awal yang penting, penyuluhan sosial memiliki posisi yang strategis karena dapat menentukan hasil dan kelangsungan program kesejahteraan sosial di masyarakat (Sugiyanto, et al., 2018).

Berdasarkan Permensos RI No. 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial, penyuluhan sosial adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan, dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyuluhan Sosial dimaksudkan sebagai gerak dasar dan awal untuk dapat lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi sasaran yang ditandai adanya peningkatan pengetahuan, adanya kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari sasaran untuk mempunyai rasa tanggung jawab penuh dalam diri sendiri sehingga penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dalam setiap program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Setidaknya, penyuluhan sosial menyangkut 5 unsur, antara lain: proses pembelajaran, adanya subjek yang belajar, pengembangan kesadaran dan kapasitas diri dan kelompok, pengelolaan sumber daya untuk perbaikan kehidupan, dan diterapkannya prinsip berkelanjutan dari sisi sosial, ekonomi, dan menerapkan fungsi kelestarian lingkungan (Amanah dalam Sugiyanto, et al., 2018). Berdasarkan Permensos RI No. 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial, ruang lingkup penyuluhan sosial meliputi semua bentuk pelayanan sosial yang

terdiri dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta perlindungan sosial.

2. Tujuan Penyuluhan Sosial

Tujuan penyuluhan sosial tidak lain adalah hidup dan kehidupan manusia yang berkualitas dan bermartabat (Amanah dalam Sugiyanto, et al., 2018). Berdasarkan Permensos RI No. 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial, penyuluhan sosial bertujuan untuk:

- a. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan kualitas dan komitmen penyelenggaraan pelayanan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
- c. Menyinergikan sumber daya manusia penyuluh sosial dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial.

3. Fungsi Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial memiliki berbagai fungsi, yaitu:

- a. Fungsi preventif artinya penyuluhan sosial ditujukan untuk memastikan tidak ada muncul masalah-masalah sosial yang baru.
- b. Fungsi remedial (kuratif/rehabilitatif) artinya penyuluhan sosial ditujukan untuk menanggulangi masalah-masalah sosial yang telah muncul.
- c. Fungsi pengembangan artinya penyuluhan sosial ditujukan untuk upaya pengembangan masyarakat.

- d. Fungsi penunjang artinya penyuluhan sosial tidak hanya ditujukan pada bidang kesejahteraan sosial saja, tetapi juga dapat menunjang bidang lain yang relevan secara lintas sektor.

4. Metode Penyuluhan Sosial

Penyelenggaraan penyuluhan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Adapun penyuluhan sosial diprioritaskan kepada pihak yang memiliki kriteria sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Penyuluhan sosial dapat juga diberikan kepada para pemangku kepentingan. Berdasarkan Permensos RI No. 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial, metode penyuluhan sosial dapat dilakukan melalui individu, kelompok, dan massal, baik secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung (perantara media).

- a. Metode penyuluhan sosial individu dilakukan melalui tatap muka antara penyuluh dengan perorangan yang menjadi sasaran penyuluhan.
- b. Metode penyuluhan sosial kelompok dilakukan secara berkelompok, di mana kelompok dijadikan sasaran dalam proses penyuluhan sosial.
- c. Metode penyuluhan sosial massal dilakukan secara massal pada kelompok masyarakat.

5. Teknik Penyuluhan Sosial

Berdasarkan Permensos RI No. 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial, teknik penyuluhan sosial terdiri dari komunikasi, informasi, motivasi, dan edukasi.

- a. Teknik penyuluhan sosial komunikasi merupakan upaya penyampaian informasi dari penyuluh sosial kepada sasaran penyuluhan dengan menggunakan saluran atau media yang dipahami kedua belah pihak dan saling memiliki kesamaan makna dari pesan yang disampaikan.
- b. Teknik penyuluhan sosial informasi merupakan upaya komunikasi berupa pesan atau/informasi yang diberikan dari satu orang ke orang lain.
- c. Teknik penyuluhan sosial motivasi merupakan upaya untuk mengarahkan daya dan potensi sasaran penyuluhan sosial agar mau berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
- d. Teknik penyuluhan sosial edukasi merupakan upaya untuk meyakinkan sasaran penyuluhan melalui pengajaran, penanaman nilai, opini, serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi intensif maupun proses pembelajaran yang kondusif.

6. Media Penyuluhan Sosial

Materi atau pesan penyuluhan sosial merupakan gagasan berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan disampaikan pada sasaran penyuluhan sosial. Materi atau pesan penyuluhan disuluhkan ditentukan berdasarkan kebijakan program yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, hasil evaluasi, peta permasalahan sosial, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat. Diperlukan suatu media untuk menyampaikan materi penyuluhan sosial. Berdasarkan Permensos RI No. 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial, bentuk media penyuluhan sosial terdiri dari media cetak, elektronik, peragaan, dan luar ruang.

- a. Bentuk media cetak dapat berupa koran, majalah sosial, buku bergambar, *leaflet* atau poster.
- b. Bentuk media elektronik dapat berupa radio, televisi, megatron, *cyber media* seperti internet, sosial media atau *running text*.
- c. Bentuk media peragaan dapat berupa pameran, alat peraga tertentu, pertunjukan seni baik tradisional maupun modern/kontemporer atau dongeng
- d. Bentuk media luar ruang dapat berupa baliho atau *banner*.

2.2.6 Relevansi Penelitian dengan Praktik Pekerjaan Sosial

1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Pincus & Minahan (dalam Pujileksono, Abdurahman, Yuliani, & Wuryantari, 2020) menyatakan bahwa pekerjaan sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungannya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka. Adapun Zastrow (dalam Pujileksono, Abdurahman, Yuliani, & Wuryantari, 2020) turut menyatakan bahwa pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Berdasarkan banyaknya teori dan pendapat ahli mengenai definisi pekerjaan sosial, maka Pujileksono, Abdurahman, Yuliani, & Wuryantari (2020) menyimpulkan bahwa:

- a. Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional

- b. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang membantu individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat.
- c. Pekerjaan sosial menyediakan layanan sosial dan bantuan intervensi secara ekonomi, fisik, mental, dan sosial bagi yang kurang beruntung
- d. Pekerjaan sosial bertujuan untuk membantu orang mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya sendiri dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah.

2. Tujuan Praktik Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial tidak hanya mempertimbangkan perjuangan internal individu, tetapi pekerja sosial juga bekerja sama dengan orang untuk memeriksa hubungan, sejarah keluarga, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dan struktur serta kebijakan yang berdampak pada mereka untuk mengidentifikasi cara-cara dalam membantu mengatasi masalah atau tantangan. Tujuan umum praktik pekerjaan sosial adalah perubahan yang terkendali dan terencana dalam sistem kepribadian individu dan sistem sosial. Tujuan utama pekerja sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama untuk populasi yang paling rentan.

Adapun Pujileksono, Abdurahman, Yuliani, & Wuryantari (2020) mengemukakan tujuan pekerjaan sosial sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah (*to enhance the problem-solving and coping capacities of people*)

- b. Menghubungkan orang dan sistem sehingga dapat menyediakan sumber, pelayanan, dan kesempatan (*link people with systems that provide them with resources, services, and opportunities*)
- c. Meningkatkan efektivitas operasional sistem secara manusiawi (*promote the effective and humane operation of these systems*)
- d. Memberikan kontribusi pada perkembangan dan penyempurnaan perumusan dan implementasi kebijakan sosial (*contribute of the development and improvement of social policy*).

3. Prinsip dalam Praktik Pekerjaan Sosial Makro

Ife (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang mendasari praktik pekerjaan sosial dengan komunitas, antara lain:

- a. Prinsip dasar yang terdiri dari prinsip holistik, berkelanjutan, menghargai perbedaan, pengembangan organik, keseimbangan pembangunan, saling bergantung, mengatasi masalah struktural, menyikapi wacana yang merugikan, pemberdayaan, mendefinisikan kebutuhan, dan HAM.
- b. Prinsip menghargai penduduk asli/lokal yang terdiri dari prinsip pembangunan berbasis aset, menghargai pengetahuan lokal, menghargai budaya lokal, menghargai sumber daya lokal, menghargai keterampilan lokal, dan menghargai proses lokal.
- c. Prinsip proses yang terdiri dari prinsip proses-outcome-visi, proses-tugas, integritas proses, peningkatan kesadaran, hubungan dan dialog, partisipasi, kerja sama dan kesepakatan (konsensus), kecepatan pembangunan, damai dan tanpa kekerasan, inklusivitas, dan pembangunan komunitas.

d. Prinsip global dan lokal yang terdiri dari prinsip menghubungkan global dan lokal dan praktik anti kolonialisme.

4. Praktik Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

Sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan, yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial menurut Soetarso (dalam Rustanto, 2014) di mana pekerja sosial melaksanakan tugas dan fungsi praktik pekerjaan sosial, antara lain:

- a. Membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memecahkan masalah mereka.
- b. Menciptakan jalur hubungan pendahuluan di antara orang-orang dengan sistem sumber
- c. Mempermudah interaksi, merubah, dan menciptakan hubungan baru di antara orang dengan sistem sumber kemasyarakatan
- d. Mempermudah interaksi, merubah, dan menciptakan hubungan di antara orang-orang di lingkungan sistem sumber
- e. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, dan perkembangan kebijaksanaan dan perundang-undangan sosial
- f. Meratakan sumber-sumber material
- g. Bertindak sebagai kontrol sosial.

Demi mewujudkan praktik pekerjaan sosial yang efektif dalam menangani masalah kemiskinan, maka pekerja sosial harus dibekali dengan berbagai keterampilan praktik pekerjaan sosial. Ife (2002) berpendapat bahwa kompetensi identik dengan keterampilan, di mana keterampilan merupakan penjabaran dari

peranan. Terdapat empat peranan pekerja sosial dalam intervensi komunitas menurut Ife, antara lain:

- a. Peran fasilitatif, di mana penerapannya harus didukung dengan keterampilan dalam hal animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberian dukungan, membangun konsensus, fasilitasi kelompok, keterampilan dan sumber daya, pengorganisasian, dan komunikasi pribadi.
- b. Peran edukasional, di mana penerapannya harus didukung dengan keterampilan dalam hal peningkatan kesadaran, penginformasian, konfrontasi, dan pelatihan.
- c. Peran representatif, di mana penerapannya harus didukung dengan keterampilan dalam hal memperoleh sumber daya, advokasi, penggunaan media, hubungan masyarakat, jaringan, dan berbagi ilmu dan pengalaman.
- d. Peran teknikal, di mana penerapannya harus didukung dengan keterampilan dalam hal pengumpulan dan analisis data, penggunaan komputer, presentasi verbal dan tulisan, manajemen, dan kontrol finansial.

Spergel dan Zastrow (dalam Adi, 2013) mengemukakan tujuh peranan pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat, antara lain :

- a. Pemercepat Perubahan (*Enabler*)

Pekerja sosial membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah, serta mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Adapun empat fungsi utama pekerja sosial sebagai *enabler* adalah membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka, membangkitkan dan

mengembangkan “organisasi” dalam masyarakat, mengembangkan relasi interpersonal yang baik, serta memfasilitasi perencanaan yang efektif.

b. Perantara (*Broker*)

Pekerja sosial menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community services*), tetapi tidak tahu dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut, dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat. Peran ini dilakukan dengan melibatkan klien dalam kegiatan penghubungan ini, supaya bila sudah tiba saatnya melakukan terminasi, klien yang bersangkutan dapat tetap menjalin hubungan dengan lembaga terkait.

c. Pendidik (*Educator*)

Pekerja sosial mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh masyarakat yang menjadi sasaran perubahan. Pekerja sosial harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan. Bila kurang memahami, maka dapat menghubungi rekan dari profesi lain atau ahlinya agar memperoleh informasi yang cukup memadai untuk disampaikan pada masyarakat. Terkait dengan peran ini, pekerja sosial harus selalu mau belajar, mengikuti perkembangan masyarakat ataupun tren masalah.

d. Tenaga Ahli (*Expert*)

Pekerja sosial memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area. Usulan dan saran tersebut tidak harus mutlak dijalankan oleh klien (masyarakat ataupun organisasi), tetapi lebih merupakan masukan gagasan

sebagai bahan pertimbangan masyarakat ataupun organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Pada umumnya klien dari *expert* adalah HSO, GO, dan NGO. Peran ini berkaitan erat dengan peran perencana sosial.

e. Perencana Sosial (*Social Planner*)

Pekerja sosial mengumpulkan data tentang masalah sosial, menganalisis data tersebut, menyajikan alternatif Tindakan yang rasional untuk menangani masalah, mengembangkan program, mencari alternatif sumber pendanaan, hingga mengembangkan konsensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat ataupun kepentingan. Menurut Zastrow, *expert* dan *social planner* saling tumpang tindih. *Expert* lebih memfokuskan pada perumusan usulan dan saran yang terkait dengan isu dan permasalahan yang ada, sedangkan *social planner* lebih memfokuskan pada tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program.

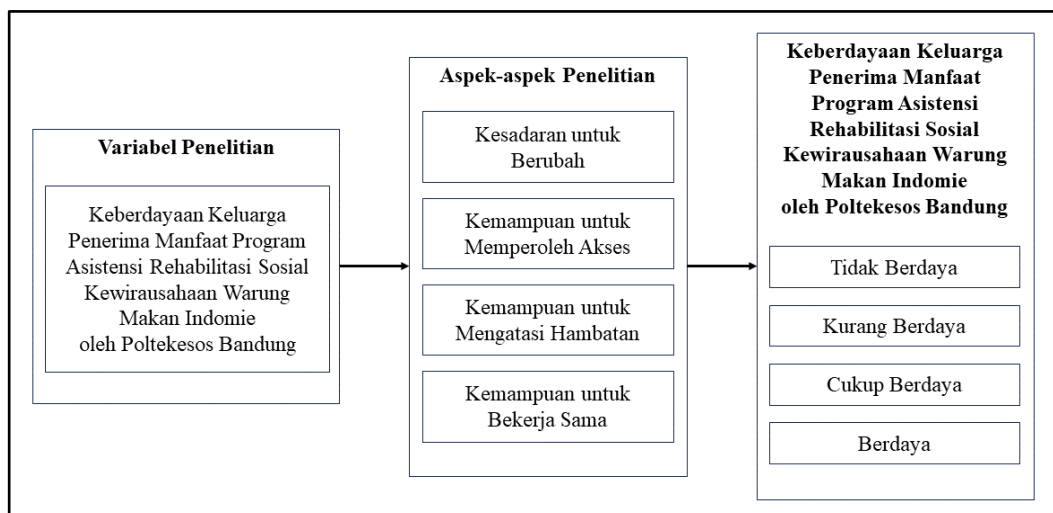
f. Advokat (*Advocate*)

Istilah advokat diadopsi dari profesi hukum. Pekerja sosial melakukan advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tidak memperdulikan (bersifat negatif atau menolak tuntutan warga). Terkait dengan peran ini, seorang pekerja sosial seringkali harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elit tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

g. **Aktivist (Activist)**

Peran ini mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan seringkali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung. Pekerja sosial harus mampu memperhatikan isu-isu tertentu, seperti ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku, kesenjangan, dan perampasan hak. Seorang aktivis biasanya mencoba merangsang kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada (yang menekan mereka), melalui taktik konflik, konfrontasi (demonstrasi), dan negosiasi.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber : Analisis oleh Peneliti (2024)